



RANWAL RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RENJA TAHUN 2026)

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**





GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
- (3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - dan
 - e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - a. RSUD Doris Sylvanus;
 - b. RSJ Kalawa Atei; dan
 - c. RSUD Hanau.
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

- a. Biro Administrasi Pimpinan;
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Perekonomian;
- f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Biro Administrasi Pembangunan;
- h. Biro Organisasi; dan
- i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik dan diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini disusun dengan memerhatikan target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD dan Rencana Strategis dalam rangka mengatasi dan memperhatikan kewenangan institusi serta perkembangan yang ada dilingkungan internal dan eksternal, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini disusun sebagai dasar pengukuran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut guna mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas semoga kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, September 2025

Kepala Dinas DP3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LIN/E VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Umum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Anatomi Fisiologi 22

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 34

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 49

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 54

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 56

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 75

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 75

3.1.1 Kementerian PPPA 75

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 53

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2025 PD 94

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 98

4.1 Program dan Kegiatan 98

BAB V PENUTUP 119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Proses Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA -PD) Tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2026 sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas P3APPKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Tahun 2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025–2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA -PD) Tahun 2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun berfungsi menterjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA 2025-2029 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026.
3. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN PD) Tahun 2026 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
4. Menyediakan dokumen untuk perwujudan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan TengahTengah disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR

ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersdiaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026 DP3APPKB disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2026. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RENJA Tahun 2023 DP3APPKB dijabarkan pada **tabel 2.1**:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcom es	Satuan	Keluaran (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.986.495.773					16.133.777.497	93,22	93,91
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.187.996.782	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100	100	%	12.745.771.198	92,96	93,78
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	378.412.500	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	%	407.444.224	98,72	99,44
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.573.877	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	32.500.750	99,78	99,78
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.046.968	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1	1	Dokumen	31.031.410	99,95	99,95
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.516.476	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Laporan	31.496.800	99,94	99,94
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.275.179	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Laporan	312.415.264	98,37	99,31
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat	8.144.034.135	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	%	7.513.913.134	90,63	90,63

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah								
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.069.876.833	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	55	Orang/Bulan	7.439.925.554	90,54	90,54
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	9.998.800	99,99	99,99
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.157.302	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	Dokumen	63.988.780	99,74	99,74
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.231.906	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	%	36.185.800	99,87	99,87
2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.231.906	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	12	Dokumen	36.185.800	99,87	99,87
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.873.906	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	%	136.223.565	84,52	96,93
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.873.906	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	30	Orang	136.223.565	84,52	96,93
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.145.329.323	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	%	2.509.446.919	99,13	99,76
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.937.132	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	Paket	23.898.200	99,84	99,84
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	900.574.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	Paket	917.469.500	99,09	99,63

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kantor								
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.008.485	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	Paket	58.008.300	100,00	100
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	Dokumen	1.590.000	99,38	99,38
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.133.129	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan	90.044.600	99,90	99,9
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920.942.077	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan	1.269.306.419	99,80	99,8
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	180.134.100	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	Dokumen	149.129.900	93,13	100
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.182.506	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	%	282.170.609	99,29	100
2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.855.456	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	54.160.000	98,73	100
2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.327.050	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	228.010.609	99,43	100
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.702.967.242	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	1.373.536.073	91,35	96

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.703.452	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan	13.697.000	99,95	99,95
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.577.648	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Laporan	203.482.961	66,81	83,22
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.369.686.142	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan	1.156.356.112	97,55	99,24
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.965.264	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	%	486.850.874	99,16	99,67
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.004.900	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	Unit	136.380.557	98,82	98,82
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.645.953	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	Unit	67.636.847	99,99	99,99
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	265.314.411	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	282.833.470	99,13	100
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.124.855.574	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	35	35	Orang	831.081.860	83,96	83,96

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	199.043.476	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	195.954.998	98,45	98,45
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	74.278.437	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	25	25	Kebijakan	71.904.400	96,80	96,8
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	71.986.600	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	9	9	Laporan	71.901.150	99,88	99,88
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	52.778.439	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1	1	Dokumen	52.149.448	98,81	98,81
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	888.786.298	Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	598.947.312	79,46	79,46
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	781.071.310	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang Keluaran politik, hukum, sosial dan ekonomi	5	30	Orang	394.411.170	72,23	72,23
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	107.714.988	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg	3	3	Lembaga	204.536.142	98,47	98,47

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi						
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	36.179.550	97,71	97,71
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/ Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	30	30	Orang	36.179.550	97,71	97,71
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	552.052.238	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	90	90	%	519.785.357	98,81	99,66
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	172.690.311	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	1	Dokumen	168.757.322	97,72	99,79
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi	50.362.102	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program	9	9	Dokumen	50.331.800	99,94	99,94

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi						
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	122.328.209	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	9	9	Perangkat Daerah	118.425.522	96,81	99,73
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	230.059.781	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	1	Dokumen	228.723.435	99,42	99,42
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.098.679	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50	50	Orang	135.813.304	99,06	99,07
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	92.961.102	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	85	85	Layanan	92.910.131	99,95	99,95

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi								
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	149.302.146	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	1	Dokumen	122.304.600	99,19	99,9
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	102.317.146	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25	25	Orang	102.198.900	99,88	99,88
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	46.985.000	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100	100	Orang	20.105.700	95,81	100
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	258.520.478	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	45	45	Orang	240.632.500	96,43	96,43
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	73.796.000	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	12	12	Kab/Kota	71.364.700	96,71	96,71

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kewenangan Provinsi								
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73.796.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	71.364.700	96,71	96,71
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.724.478	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	1	Dokumen	169.267.800	96,31	96,31
2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.724.478	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Layanan	169.267.800	96,31	96,31
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	217.530.460	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	13	13	Dokumen	199.676.790	97,39	97,39
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis	217.530.460	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	1	1	Dokumen	199.676.790	97,39	97,39

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	66.673.010	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	1	Dokumen	53.417.190	98,60	98,6
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.857.450	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1	1	Dokumen	146.259.600	96,95	96,95
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637.058.913	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	10	14	Kab/Kota	635.137.435	99,70	99,7
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	282.855.606	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	71	50	%	281.356.428	99,47	99,47
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	74.409.706	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	23.939.700	98,07	98,07
2.08.06.1.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	208.445.900	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	25	25	Perangkat Daerah	257.416.728	99,60	99,6

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	354.203.307	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	1	Dokumen	353.781.007	99,88	99,88
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104.203.307	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	30	30	orang	104.140.072	99,94	99,94
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	250.000.000	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	Kegiatan	249.640.935	99,86	99,86
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.008.481.328	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	60	60	%	961.692.357	97,31	97,4
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	514.985.634	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	1	1	Dokumen	471.098.157	95,22	95,22

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96.126.741	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	91.644.600	95,34	95,34
2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	418.858.893	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	14	14	Kegiatan	379.453.557	95,19	95,19
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	493.495.694	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	1	Dokumen	490.594.200	99,41	99,58
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	121.578.742	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30	30	Orang	121.522.100	99,95	99,95
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	371.916.952	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30	30	Orang	369.072.100	99,24	99,46

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<u>998.065.209</u>					<u>828.123.264</u>	97,65	97,65
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151.984.773	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2	2,28	Indeks	143.446.176	94,38	94,38
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	151.984.773	Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	1	Dokumen	143.446.176	94,38	94,38
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	151.984.773	Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	1	Dokumen	143.446.176	94,38	94,38
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	-	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	-	Dokumen	-	-	-
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	64.222.990	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5	5	%	36.238.120	99,72	99,72
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan	27.883.045	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB	1	-	Dokumen	-	-	-

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		sesuai kearifan budaya lokal						
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.883.045	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1	-	Dokumen	-	-	-
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.339.945	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	1	Dokumen	36.238.120	99,72	99,72
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam	36.339.945	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan	30	30	Organisasi	36.238.120	99,72	99,72

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Bangga Kencana		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	781.857.446	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	65	62,70	%	648.438.968	98,29	98,29
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	781.857.446	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	1	Dokumen	648.438.968	98,29	98,29
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	781.857.446	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	1	Dokumen	648.438.968	98,29	98,29
	PAGU TOTAL*	17.984.560.982					16.961.900.761	93,43	94,08

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - a) Kebijakan berupa Peraturan Daerah
 - b) Penguatan Kapasitas Jaringan Pengarusutamaan Gender melalui Sosialisasi PUG mengenai konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Anggaran Responsif Gender (ARG), Pelatihan Fasilitator PUG dan Pelatihan Pendampingan dan Advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pendampingan dan konsultasi penyusunan Renstra/Renja SKPD yang responsif gender.
 - c) Ketersediaan data gender dan anak.
 - d) Kemitraan dan jaringan antara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 - e) Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak

- a) Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan daerah ini bersifat spesifik hanya memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban dan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b) Upaya pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan didukung alokasi anggaran dari pemerintah daerah, masyarakat dan peran serta dunia usaha secara terus menerus dan berkelanjutan.
 - c) Data terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak berupa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan yang selanjutnya diformulasikan oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilaporkan setiap tahunnya.
 - d) Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya diantaranya adalah UPT PPA, LSM pemerhati perempuan dan berbagai panti sosial dan pusat rehabilitasi milik Instansi Vertikal.
 - e) Kebijakan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain dengan adanya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memperkuat komitmen dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak
3. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Program Keluarga Berencana bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran. Adapun kegiatan tersebut yaitu Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB Nasional. Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KB Nasional ditujukan untuk meningkatkan KIE Program KB.
 - b) Kegiatan meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera.
 - c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB yang telah dilaksanakan adalah kegiatan khusus seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;

8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;

11. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. penyerasian kebijakan kependudukan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, antara lain :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel 2.1.:

Tabel 2.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Indeks Pembangunan	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
			Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender.
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender
2	Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaa n perempuan	Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
3	Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappedalitbang, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender <i>machinery</i> di daerah belum optimal
4	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran	Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i> .	Kurang nya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan mengenai data terpilah Gender dan Anak	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor
6	Belum terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak beberapa kabupaten/kota	Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Minimnya anggaran dalam mendukung pembentukan forum di tingkat kabupaten/kota
7	Belum terwujudnya Kalimantan Tengah Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/ kota Layak Anak dengan capaian indikator pemenuhan I Hak Anak >500	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang resposif hak anak Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
8	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

9	Belum optimalnya sumber daya pendukung dalam pelaksanaan pelayanan UPT PPA	Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan layanan UPT serta belum memadai sarana pendukung seperti gedung perkantoran, etalase pelayanan dan belum tersedia rumah aman.	Minimnya dukungan UPT PPA sebagai UPT yang menerima berbagai kasus yang kompleks, yang harusnya ditangani secara komprehensif , mengingat fungsinya sebagai rujukan lanjutan.
10	Tingginya Angka kelahiran total		Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE
			Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi
11	Stunting pada anak	Masih tingginya prevalensi <i>stunting</i>	Masih minimnya pemahaman keluarga tentang <i>stunting</i>
			Praktek pengasuhan yang kurang baik
12	Pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga
			Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini
			Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2025 -2029 adalah :

VISI :

“Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”.

MISI :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
2. Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan yang inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat
3. Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat sebagai keadilan sosial
5. Pemberdayaan keadilan local dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra secara terfokus mendukung:

- a. Misi Kedua : **“Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belum Bahadat”**
- b. Misi Keempat : **“Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial”.**
- c. Misi Kelima :” **Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta**

kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”

Misi kedua dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
- f) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi keempat dan kelima, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal Falsafah Huma betang (Rumah Besar) Pokok Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:
 - b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman Pancasila dan cinta damai
 - c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
 - d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
 - e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.
- 1) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;

- 2) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI					
“Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”					
Misi 2					
Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat					
Misi 4					
Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social					
Misi 5					
Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan <i>Focal Point</i> Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	PUG merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Kalimantan Tengah Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha maupun penentuan menjadi Pejabat Publik	Kesempata n dan peluang untuk Perempuan masih tinggi dengan didukungny a Perda PUG No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksana an PUG dalam Pembangu nan	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatka n keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif

VISI “Meningkatkan Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”					
Misi 2 Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat Misi 4 Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social Misi 5 Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDERONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
3	Banyaknya pelaku Ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata dan cenderung rendah	Masih adanya diskriminasi dalam Memperoleh akses Terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait		
4	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i>	Kurang nya SDM yang memahami utk pengu pulan data/penginputandata	Adanya Tim Penyusun Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Dukungan pemerintah daerah dalam keterbukaaan informasi publik berbasis aplikasi
5	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Advokasi, sosialisasi serta Koordinasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke tingkat pusat dan kabupaten/k ota	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA 1. Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT 4. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang
6	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Rendahnya Penididikan dan Kualitas hidup Masyaraka t 2. Masih adanya pemaham an masyarakat bahwa kekerasan merupaka n aib keluarga sehingga mereka enggan melaporka n kasus nya.	Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait	1. Implement asi Peraturan Perundang - undangan belum optimal 2. Belum terbentukn ya kelompok masyarakat untu k peduli dan membantu penangan an kasus kekerasan 3. Adanya kemajuan tehnologi, penyebab	

VISI “Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”					
Misi 2 Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat Misi 4 Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social Misi 5 Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
		3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak		kan anak – anak dengan mudanya mengakses <i>social media</i> , yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	menangani perlindungan perempuan dan anak
7	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	Terbatasnya kouta penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan UPT PPA	Sosialisasi secara berkala tentang keberadaan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	Sudah terbentuknya UPT Provinsi dan beberapa UPT kabupaten yang memacu pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kualifikasi

VISI “Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”					
Misi 2 Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat					
Misi 4 Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social					
Misi 5 Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Tingkat kesadaran usia untuk berkeluarga yang masih rendah akibat dari rendahnya ekonomi keluarga	Sebagai <i>leading sector</i> terkait anak akan memudahkan koordinasi dengan lintas sektor dan SKPD terkait	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak
2	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

2.3.1 **Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah**

Pengukuran tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:

**Tabel
2.3.**

**Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024**

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	74,60% 3,16%
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	100%
3.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak - Indeks Perlindungan Anak (IPA) - Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	60,37% 100%
4.	Meningkatkan kualitas keluarga - Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) - Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) - Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	62,70 2,28 36
5.	Meningkatnya akseptor KB - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR) - Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	73,02 6,82
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/40/2025 tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka tugas pokok Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 4) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
- 5) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 6) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 7) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- 8) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- 9) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- 10) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- 11) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Adapun gambaran skema struktur organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut pada Gambar 2.1



Secara umum Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu:

- a). Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- b). Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan 2 urusan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dengan 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Susunan organisasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Berencana, terdiri atas:

Berikut akan dipaparkan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dan kelompok jabatan fungsional dalam Struktur Organisasi Dinas P3 Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender;
- 2) Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 3) Menetapkan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 4) Menetapkan program data dan informasi gender dan anak;
- 5) Menetapkan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 6) Menetapkan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
- 7) Menetapkan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- 8) Memperkuat kelembagaan Keluarga Kecil berkualitas;
- 9) Memperkuat kebijakan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- 10) Menetapkan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- 11) Melaksanakan keserasian kebijakan kependudukan;
- 12) Melaksanakan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menghimpun bahan/data perencanaan dan penyusunan program serta anggaran Dinas;
- 2) Melaksanakan perumusan administrasi kepegawaian;
- 3) Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- 4) Melaksanakan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- 6) Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

a) Sub Bagian Keuangan dan Aset, yang mempunyai tugas: pengelolaan keuangan dan aset.

b) Sub Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas: mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan kajian dan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan

pendidikan;

- 2) Melaksanakan fasilitasi pembentukan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 3) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 4) Melaksanakan pengordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 5) Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 6) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 7) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 8) Melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 9) Melaksanakan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;

- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pelembagaan PUG di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 11) Menyusun pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.

D. Bidang Data dan Informasi

Bidang Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 3) Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 5) Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 8) Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website* (e-gov);

- 9) Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang data dan partisipasi masyarakat;

E. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

1. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 2) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak
- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 5) Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 7) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
- 8) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- 9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

F. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum

koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- 4) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 5) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 6) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 8) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga;

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;

- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
- 7) Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 8) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 9) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis advokasi, pergerakan dan informasi;
- 11) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengendalian penduduk;

H. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) mempunyai tugas operasional teknis penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT-PPA menyelenggarakan fungsi :

- 1) Memberikan layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
- 2) Memberikan layanan penadampingan hukum;
- 3) Memberikan layanan penadampingan psikologis;
- 4) Memberikan layanan penadampingan bimbingan rohani;
- 5) Memberikan perlindungan khusus;

- 6) Memberikan layanan penjangkauan korban;
- 7) Melaksanakan pengelolaan kasus;
- 8) Memberikan layanan penampungan sementara;
- 9) Memberikan layanan mediasi terkait kasus anak;
- 10) Memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
- 11) Memberikan rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;
- 12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;

Susunan organisasi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA), terdiri atas :

- 1. Seksi Bagian Tata Usaha**, yang mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub bagian Atata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- 2. Seksi Pengaduan**, yang mempunyai tugas : melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung, dan melindungi korban di penampungan sementara.
- 3. Seksi Tindak Lanjut**, yang mempunyai tugas : melaksanakan mediasi, emlakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya dan penadampingan korban dalam upaya pemulihan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

1. Pranata Komputer Ahli Pratama
2. Perencana Ahli Pertama
3. Perencana Ahli Muda
4. Analis Kebijakan Ahli Muda

2) Jabatan Fungsional Umum

Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum juga ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

A. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kebijakan operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana yang masih perlu ditelaah dan disinergikan;
- Masih kurangnya pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan, anak, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
- Masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan kadilam dan hak asasi serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga dapat menghambat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- Perlunya menanamkan persepsi masyarakat tentang Pengarusutamaan gender, Perlindungan Terhadap perempuan dan anak perlindungan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut dalam aspek kehidupan terutama pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu secara khusus Bidang PUG, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat terus berinovasi untuk membuat perencanaan program kegiatan .

B. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

- Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- Tingkat pemahaman aparaturnya pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

C. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- Tanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan mengalami proses yang panjang untuk terlaksana.
- Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan perlu peningkatan
- Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum maksimal dikarenakan hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparaturnya negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

D. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP3APKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tantangan

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
- Disparitas Indeks Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.

- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG
- Meningkatnya kasus kekerasan pada Anak dan Perempuan
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG)
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
- Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
- Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
- Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

Peluang

- Menguatnya isu Gender
- Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
- Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
- Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
- Dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tempat pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja

- Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Kemajuan teknologi informasi
- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- Kemudahan informasi tentang KB
- Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

Kekuatan

- Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3APP-KB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal
- SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
- Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Terbentuknya jejaring kelembagaan
- Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait
- Dukungan lintas Sektor yang terkait dalam perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Tengah
- Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

Kelemahan

- Kurang optimalnya sarana dan prasarana
- koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait masih belum optimal
- *Reward and Punishment* belum berjalan optimal
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
- Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
- Anggaran masih terbatas
- Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender
- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

E. Isu-isu strategis DP3APKKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
 - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

2. Perlindungan Anak :

- a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
- b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
- c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- d. Perkawinan Usia Anak tertinggi no 2 di Indonesia

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan Tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas

daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang telah ditetapkan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan 2025-2029. Disatu sisi, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 ini memperhatikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah maka DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam melaksanakan review rancangan akhir RKPD proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan akhir RKPD tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan akhir RKPD dapat dilaksanakan
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan
- Besarnya dana dalam rancangan akhir RKPD
- *Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Akhir RKPD**

Untuk lebih jelasnya review rancangan RKPD tahun 2026 terhadap hasil analisa kebutuhan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 2.3.** sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2026
Provinsi Kalimantan Tengah

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		-	21.329.909.105,10	-	-
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100%	16.677.131.562,10		
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	539.205.000,00		
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	146.037.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	28.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	42.015.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	323.153.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	9.509.381.769,00		
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bul an Orang/ Bulan	9.409.336.769,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.838.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	89.207.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	42.459.000,00		
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42.459.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	267.778.000,00		
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	267.778.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	3.686.896.457,10		
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	711.462.457,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73.640.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	65.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.656.760.000,10	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	133.034.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	779.782.336,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	14 Unit	529.782.336,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.227.415.000,00		
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	866.615.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	624.214.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	199.214.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	75.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah <i>Focal Point</i> PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	40	1.752.700.000,00		
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	280.500.000,00		
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2 Kebijakan	66.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	1 Laporan	53.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	100 Orang	103.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	50 Lembaga	57.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	1.393.700.000,00		
	2.08.02.1.02.0005 Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	9 Lembaga	38.700.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang	1.280.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	75.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	78.500.000,00		
	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	78.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	92,5	1.563.940.000,00		
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	520.522.000,00		
	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	154.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0004 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	25 Orang	64.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0005 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Laporan	36.450.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.01.0006 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	111.460.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	4 Kegiatan	154.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	430.800.000,00		
	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	8.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	17.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	180.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	47.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	612.618.000,00		
	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	80 Orang	167.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	10 Dokumen	156.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	37.450.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0008 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	126.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0009 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 Lembaga	126.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	50	257.059.094,00		
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	1	257.059.094,00		
	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	147.544.590,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	50 Lembaga	109.514.504,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	14	189.278.449,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	189.278.449,00		
	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	72.544.590,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	116.733.859,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	12	390.000.000,00		
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	85,71	222.000.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50 Lembaga	150.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Laporan	72.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	168.000.000,00		
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	168.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	65	499.800.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	1	244.000.000,00		
	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50 Lembaga	74.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Laporan	170.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	255.800.000,00		
	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	105.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	108.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	16.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	8.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
2	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		-	<u>1.771.500.000,00</u>	-	-
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total/<i>total fertility Rate</i> (TFR)	1,96	229.000.000,00		
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	229.000.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.02.1.01.0021 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	27.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	115.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	55.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	5,01	631.500.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	351.500.000,00		
	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	27.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	1 Daerah	110.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	157.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	57.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	280.000.000,00		
	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30 Organisas i	140.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	30 Organisas i	140.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55	911.000.000,00		
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	552.000.000,00		
	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	700 Keluarga	200.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0022 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0028 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	359.000.000,00		
	2.14.04.1.02.0006 Fasilitas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	14 Kabupaten/Kota	295.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.02.0007 Fasilitas kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.02.0011 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
GRAND TOTAL				23.101.409.105		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kementerian PPPA

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019–2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

Visi Kementerian PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: "Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun

2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

4. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
5. peningkatan perlindungan anak; dan
6. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan Perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
2. Indeks Pemberdayaan Gender IDG)

3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan Anak;
3. penurunan ke kerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.



Gambar 3.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3.	TPAK Perempuan
4.	Indeks PUG Nasional
5.	Indek Perlindungan Anak (IPA)
6.	Proporsi Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
7.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat menuju KLA
8.	Prosentasi balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
9.	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
10.	Indeks Kualitas Keluarga
11.	Prevalensi Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperenhensip (SPHPN dan Simponi)
12.	Persentasi pemula yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
13.	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR 2018)
14.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan Komperensif (SNPHAR dan Simponi)
15.	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
16.	Indek Reformasi Birokrasi
17.	Opini BPK atas Laporan Keuangan
18.	Tingkat Maturitas SPIP
19.	Nilai SAKIP

Sasaran Strategis Kementerian PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan

keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

A. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu 2. Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

B. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

C. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

D. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif.

E. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

F. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- Indeks Reformasi Birokrasi;
- Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- Tingkat Maturitas SPIP; dan
- Nilai SAKIP.

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 2. Pembangunan Infrastruktur 3. Penyederhanaan Regulasi 4. Penyederhanaan Birokrasi, dan 5. Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung

pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdayasaing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.

3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;

1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat. Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

- a. peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;
- b. perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;
- c. peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;
- d. peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
- e. penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi; dan
- f. penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan: PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

- 1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
- 2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
- 3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
- 4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

c. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:

- 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
- 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
- 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
- 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
- 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
- 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

d. menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

- 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- e. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - 4) Peningkatan KB Pria.
 - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam KB.
- f. meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- 1) Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- g. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil

Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
 - c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.
2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB,
 - b. serta Pengelolaan Organisasi dan Tata laksana;
 - c. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
 - d. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
 - e. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
 - f. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tangga yang berkualitas.
3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:
- a. mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif;
 - b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikanperkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baikoleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan)mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/KegiatanBangga Kencana yang inklusif gender.

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

Tabel 3.2
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Nasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
2.	Perlindungan Perempuan	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional - Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten / kota - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		perlindungan perempuan	- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi	- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
3.	Kualitas Keluarga	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Sistem Data Gender dan Anak	- Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam	- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi	- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		kelembagaan data di tingkat nasional		
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

Tabel 3.3
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana (KB)	- Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian Penduduk - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran	- Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam - pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	- Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Standarisasi dan Sertifikasi	- Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	-----	-----

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2025 PD

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025 – 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2025 – 2029, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Visi

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APPKB pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 - 2029 dirumuskan sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Tujuan 1 | Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan |
| Tujuan 2 | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan |
| Tujuan 3 | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak |
| Tujuan 4 | Meningkatkan kualitas data gender dan anak |
| Tujuan5 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tujuan 6 | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera |

Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan*
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah *“Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender”* yang ditandai dengan:
- Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
 - Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
 - Persentase perempuan di lembaga legislatif
 - Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan*
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah *“Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO”* yang ditandai dengan:
- Rasio kekerasan terhadap perempuan da TPPO
“Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO” yang ditandai dengan:
 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
- Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak*
- Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu: *“Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak”* yang ditandai dengan:
- Indeks Perlindungan Anak (IPA)
 - Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
 - Rasio anak korban kekerasan
“Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak”
- yang ditandai dengan:
- Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

- Tujuan 4** *Meningkatkan kualitas data gender dan anak*
- Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu:
“Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak”
yang ditandai dengan:
- a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
-
- Tujuan 5** *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:
“Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran”
yang ditandai dengan:
- a. Hasil Penilaian SAKIP
-
- Tujuan 6** *Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera*
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan :
- “Menurunnya angka kelahiran, Ketahanan Keluarga dan Stunting ”*
yang ditandai dengan:
- a. Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate (TFR)*
 - b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mPCR)
 - c. Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
 - d. Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR*)
 - e. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tahun 2025 disusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Nomenkalur Permendagri 90 Tahun 2019 dengan secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2024 memuat indikator kinerja *outcome/output* masing-masing Program/kegiatan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam **table 4.1** sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2026**

**SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			21.329.909.105,10		
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100%	16.677.131.562,10		
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	539.205.000,00		
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	146.037.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	28.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	42.015.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	323.153.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	9.509.381.769,00		
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bul an Orang/ Bulan	9.409.336.769,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.838.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	89.207.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	42.459.000,00		
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42.459.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	267.778.000,00		
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	267.778.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	3.686.896.457,10		
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	711.462.457,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73.640.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	65.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.656.760.000,10	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	133.034.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	779.782.336,00		
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	14 Unit	529.782.336,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.227.415.000,00		
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	866.615.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	624.214.000,00		
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	199.214.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	75.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah <i>Focal Point</i> PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	40	1.752.700.000,00		
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	280.500.000,00		
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2 Kebijakan	66.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	1 Laporan	53.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	100 Orang	103.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	50 Lembaga	57.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	1.393.700.000,00		
	2.08.02.1.02.0005 Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	9 Lembaga	38.700.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang	1.280.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	75.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	78.500.000,00		
	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	78.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	92,5	1.563.940.000,00		
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	520.522.000,00		
	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	154.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.01.0004 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	25 Orang	64.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0005 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Laporan	36.450.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0006 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	111.460.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	4 Kegiatan	154.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	430.800.000,00		
	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	8.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	17.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	180.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	47.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	612.618.000,00		
	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	80 Orang	167.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	10 Dokumen	156.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	37.450.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0008 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	126.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0009 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 Lembaga	126.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	50	257.059.094,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	1	257.059.094,00		
	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	147.544.590,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	50 Lembaga	109.514.504,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	14	189.278.449,00		
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	189.278.449,00		
	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni	1 Dokumen	72.544.590,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PPA				
	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	116.733.859,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	12	390.000.000,00		
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	85,71	222.000.000,00		
	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50 Lembaga	150.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Laporan	72.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	168.000.000,00		
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	168.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	65	499.800.000,00		
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	1	244.000.000,00		
	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50 Lembaga	74.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Laporan	170.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	255.800.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	105.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	108.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	16.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	8.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
2	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		-	<u>1.771.500.000,00</u>	-	-
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	1,96	229.000.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	229.000.000,00		
	2.14.02.1.01.0021 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	27.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	115.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	55.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	5,01	631.500.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	351.500.000,00		
	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	27.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	1 Daerah	110.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	157.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya	1 Laporan	57.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Lokal				
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	280.000.000,00		
	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30 Organisas i	140.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	30 Organisas i	140.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55	911.000.000,00		
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	552.000.000,00		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	700 Keluarga	200.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0022 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0028 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	359.000.000,00		
	2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	14 Kabupaten/Kota	295.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.02.0011 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
GRAND TOTAL				23.101.409.105		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja-PD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (Trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi Keluaran berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUHA) di semua Perangkat daerah (PD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat.

Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas akhir yang paling mendasar dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (impact) dari capaian layanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh stakeholder, mengingat jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.